

**TESIS**

**PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN  
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG  
BERASAL DARI LUAR KOTA BANDUNG DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI**



**Christine Herlina**

**NIM 23.C2.0081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

**TESIS**

**PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN YANG BERASAL DARI LUAR KOTA  
BANDUNG DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi Magister Hukum Kesehatan**



**Christine Herlina**

**NIM 23.C2.0081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, merata, dan non diskriminatif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin yang berasal dari luar Kota Bandung dalam memperoleh pelayanan di RSUD Bandung Kiwari. Permasalahan muncul karena pasien tersebut tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Bandung dan tidak termasuk dalam skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Akibatnya, RSUD Bandung Kiwari tidak memperoleh penggantian biaya pelayanan, yang berimplikasi pada meningkatnya beban keuangan rumah sakit dan potensi terhambatnya keberlanjutan pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berasal dari luar Kota Bandung di RSUD Bandung Kiwari, mengidentifikasi implikasi hukum dan administratif terhadap rumah sakit, serta merumuskan alternatif solusi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat dasar hukum yang tegas mengenai mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin lintas daerah. Kebijakan rumah sakit yang bersifat diskresi administratif seperti pemberian potongan biaya dan penjadwalan ulang pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan akuntabilitas dan kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Wali Kota, Peraturan Gubernur, atau Keputusan Direktur RSUD yang secara khusus mengatur pembiayaan pelayanan kesehatan lintas daerah sebagai perwujudan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, masyarakat miskin, pelayanan kesehatan, RSUD Bandung Kiwari, pembiayaan daerah.

## ABSTRACT

*Health care is a constitutional right of every citizen as guaranteed under Article 28H paragraph (1) and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The fulfillment of this right constitutes a state obligation to ensure that health services are accessible, equitable, and non-discriminatory. In practice, however, disparities in access to health services persist, particularly for impoverished individuals originating from outside Bandung City who seek treatment at Bandung Kiwari Regional General Hospital (RSUD Bandung Kiwari). The problem arises because these patients are not registered as Bandung City residents and are not included in the local health financing scheme funded by the Bandung City Regional Budget (APBD). Consequently, the hospital does not receive reimbursement for the services provided, resulting in a significant financial burden and potential disruption to the sustainability of public health services.*

*This study aims to analyze the form of legal protection for impoverished individuals from outside Bandung City who receive health services at RSUD Bandung Kiwari, to identify the legal and administrative implications for the hospital, and to formulate alternative legal solutions that promote justice and legal certainty. The research employs a juridical-sociological method with a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, literature studies, and an analysis of relevant legislation and local policies.*

*The findings reveal the absence of a clear legal framework governing the financing mechanism for interregional health services provided to impoverished patients. The hospital's administrative discretion—such as granting payment reductions or deferred payments—lacks a formal legal basis, which poses risks to accountability and legal certainty. This indicates that the state's responsibility to guarantee the right to health has not been fully implemented effectively. Therefore, it is necessary to establish derivative regulations in the form of a Mayor Regulation, Governor Regulation, or Director's Decree that specifically regulates the financing of cross-regional health services as a manifestation of the principles of justice, utility, and legal certainty.*

**Keywords:** *legal protection, impoverished community, health services, RSUD Bandung Kiwari, regional financing.*